

***PERAN BALAI JASA KONSTRUKSI  
WILAYAH V BANJARMASIN  
DALAM MENDUKUNG  
PENGUATAN JASA KONSTRUKSI  
WILAYAH KALIMANTAN***

***Disampaikan pada acara :  
Rakorda Jasa Konstruksi  
Kalimantan Timur  
PPU, 22 November 2023***

# Agenda

## RAKORDA JASA KONSTRUKSI KALIMANTAN TIMUR

Tema :

“Penguatan Kelembagaan Sub Urusan  
Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota Menuju  
Berdaya Saing”

Presenter:

Boma Rizkiko, ST. (Kasi. Pelaksanaan)

hp. 0895-1750-2317

email. bjkwvbanjarmasin@pu.go.id

JADWAL  
RAPAT KOORDINASI DAERAH SUB URUSAN  
SE - KALIMANTAN

DENGAN TEMA :  
“PENGUATAN KELEMBAGAAN SUB URUSAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN / KOTA  
MENUJU BERDAYA SAING”

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

*Pemang Paser Utara, 22 November 2023*

NO	WAKTU	MATERI	URAIAN
1.	08.00 - 08.05	Lagu Indonesia Raya	Peserta
2.	08.05 - 08.10	Mars Kalimantan Timur	Peserta
3.	08.10 - 08.15	Pembaca Do'a	Panitia
4.	08.15 - 08.30	Laporan Kepala Dinas	A.M. Fitra Firnanda, ST, MM (Kepala Dinas PUPR dan PERA Provinsi Kalimantan Timur)
5.	08.30 - 08.40	Sambutan Selamat datang	Drs. Makmur Marbun, M.Si (P. Bupati Kabupaten Paser Utara)
6.	08.40 - 08.50	Sambutan dan Sekaligus Membuka Acara Sesi Foto Bersama dan Penyerahan Plakat Narasumber	Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si (P. Gubernur Kalimantan Timur)
7.	08.50 - 09.00	ISTIRAHAT DI TEMPAT	
8.	09.00 - 09.30	Paparan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Dijeri Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI	Ir. Nicodemus Daud, M.Si (Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Dijeri Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI)
9.	09.30 - 10.00	Paparan Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Dijeri Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Ir. Suprayitno, MA (Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Dijeri Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI)
10.	10.00 - 10.20	Paparan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Yusliando, ST (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
11.	10.20 - 10.40	Paparan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur	H. Fahmi Prima Lakmana, SE, MM (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
12.	10.40 - 11.00	Paparan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Ir. H. Irhamsyah, ST, MT (Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
13.	11.00 - 11.10	<b>PAPARAN BJKW V BANJARMASIN</b>	
14.	11.20 - 11.40	Paparan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin	Ditit Zukriarnen, ST, M.Sc (Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin)
15.	11.40 - 11.45	Senam Sehat Pekerja Etam TKK Kaltim	Panitia dan Peserta
16.	11.45 - 12.00	Paparan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si (Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah)
17.	12.00 - 12.15	Paparan Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala	Ir. H. Saberi Thanoor, ST (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala)
18.	12.15 - 13.00	Diskusikan dan Tanya Jawab	Peserta
19.	13.00	PENUTUPAN	

“Tenaga Kerja Konstruksi Kaltim Adalah Pekerja Sehat”

# Outline

- 1 **Dasar Hukum dan Peraturan**
- 2 **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**
- 3 **Mitra Kerja dan Lingkup Pelaksanaan TUSI BJKW V Banjarmasin**
- 4 **Progres Pelaksanaan TUSI BJKW V TA 2023**
- 5 **Konstruksi Indonesia Tahun 2023**



01

# **DASAR HUKUM DAN PERATURAN**

# DASAR HUKUM DAN PERATURAN (1)

## DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
9. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota**

# DASAR HUKUM DAN PERATURAN (2)

## DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/IN/M/2022 tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 - 2024
12. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/SE/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi
13. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 214 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Untuk Jabatan Kerja Yang Belum Dapat Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan/atau Belum Terbentuknya Panitia Teknis Uji Kompetensi
15. Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Nomor SM0304-Dk/140, Tanggal 23 Februari 2023, tentang Revisi Jabatan Kerja Tahap II Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi untuk mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Melalui APBN DJBK Tagging IKN

# PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
<p>Jasa Konstruksi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi percontohan</li> <li>2. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan nasional</li> <li>3. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi asing</li> <li>4. Pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi</li> <li>2. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi</li> <li>2. Penyelenggaraan informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota</li> <li>3. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil)</li> <li>4. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.</li> </ol>

02

**TUGAS, FUNGSI, DAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
BJKW V BANJARMASIN**

## DIREKTORAT & SEKRETARIAT

- Perumusan kebijakan
- Pengelolaan NSPK (menyusun, merevisi, menghapus)
- Pembinaan penerapan NSPK (bimtek, coaching, sosialisasi)
- Perumusan strategi pemberdayaan mitra jakons
- Penyusunan SKKNI & Modul
- Penyiapan instrumen money
- Pengolahan data
- Pengelolaan & pengembangan SIJK
- Pemantauan & Evaluasi
- Pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko

# KATA KUNCI TUGAS & FUNGSI DJBK

Sesuai Permen PUPR PUPR No 13 tahun 2020 dan No 16 tahun 2020

## BALAI

- Pelaksanaan pelatihan/sertifikasi (TKK, instruktur, asesor, vokasi)
- Pelaksanaan pemilihan jakons
- Pelaksanaan survey
- Pengumpulan data
- Pembinaan Jakons di daerah

## LPJK

- Registrasi
- Akreditasi
- Lisensi

# PENUGASAN BALAI DITJEN BIKONS TA. 2023 (1)

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN	PENJELASAN/KETERANGAN KEGIATAN	KOORDINATOR	PIC BALAI	KATEGORI
<b>A KUALITAS KONSTRUKSI</b>						
1	Penerapan berbagai standar untuk konstruksi yang berkualitas (standar jasa konsultansi, SMKK, dll)	Bimtek Pra Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkuatan/persiapan sebelum pelaksanaan pekerjaan konsultan perancang dan konsultan pengawas</li> <li>- Dilaksanakan setelah SPPBJ, sebelum SPMK</li> <li>- Perlu kriteria proyek yang akan dijadikan sampling</li> <li>- Perlu diperjelas siapa yang akan menjadi narsum Bimtek</li> <li>- Target: Tim Teknis/Tim Pelaksana PPK, TA konsultan</li> </ul>	Dit. Pengembangan	BJKW	Penugasan
		Monev Penerapan SMKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi pelaksanaan penerapan SMKK</li> <li>- Pengecekan kesesuaian dokumen SMKK</li> <li>- Monev penerapan SMKK di proyek (perlu diperjelas proyek yang akan di-sampling)</li> <li>- Target: proyek-proyek PUPR</li> </ul>	Dit Keberlanjutan	BJKW	Penugasan
2	Monev kualitas paket pekerjaan dengan penawaran <80%	Monev paket pekerjaan dengan penawaran <80%	Target: 4 proyek PUPR di 34 Provinsi (136 proyek pilot project SIPASTI)	Dit Keberlanjutan	BP2JK	Penugasan
<b>B PEMBINAAN RANTAI PASOK &amp; PDN</b>						
1	Peningkatan registrasi MPK melalui SIMPK & Monev capaian sasaran nilai TKDN	Penugasan BJKW sebagai Tim Registrasi MPK melalui SIMPK dan Tim Monev Capaian Sasaran Nilai TKDN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan ToT/Bimtek/Internalisasi terkait Monev penggunaan MPK dan Capaian Sasaran Nilai TKDN dengan peserta perwakilan dari BJKW dan BP2JK</li> <li>- Monev penggunaan MPK dan Capaian Sasaran Nilai TKDN pada 10 proyek PUPR</li> </ul>	Dit Kelembagaan	BJKW	Penugasan

# PENUGASAN BALAI DITJEN BIKONS TA. 2023 (2)

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN	PENJELASAN/KETERANGAN KEGIATAN	KOORDINATOR	PIC BALAI	KATEGORI
<b>C PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI (TKK)</b>						
1	Pelatihan dan Sertifikasi TKK	Lomba Tukang sebagai Rangkaian Kegiatan Konstruksi Indonesia 2023	BJKW menyelenggarakan lomba pada tahap awal di wilayah kerjanya (pendanaan oleh BJKW). Selanjutnya pada tingkat Nasional diselenggarakan melalui pihak ke-3	Dit Kompetensi	BJKW	Penugasan
		Pembinaan PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)	Kegiatan-kegiatan BJKW yang melibatkan tenaga ahli agar diregister ke aplikasi PKB online, sehingga para tenaga ahli dapat memperoleh angka kredit PKB terverifikasi melalui kegiatan-kegiatan di BJKW	Dit Kompetensi	BJKW	Penugasan
<b>D MODERNISASI PBJ</b>						
1	Operasionalisasi e-HPS (SIPASTI)*  *)pemenuhan Stranas PK	Penerapan SIPASTI	- Penyelenggaraan rapat internalisasi Tim Pemantauan Penerapan SIPASTI dan Tim Pengolah Data SIPASTI di tingkat wilayah - Penyelenggaraan workshop pendamping teknis SIPASTI di wilayah provinsi	Dit Keberlanjutan	BJKW	Penugasan
2	Penerapan Sistem Informasi PBJ (SIPBJ)	Sistem Informasi PBJ (SIPBJ)	- BP2JK memastikan semua dokumen lelang sudah diinput oleh Satker/PPK pada SIPBJ - BP2JK memastikan semua dokumen kontrak dan kelengkapannya sudah diinput oleh Satker/PPK dan melakukan update progres pekerjaan pada SIKOMPAK - BP2JK memastikan Satker/PPK sudah input data HPS pada SIPASTI. - BP2JK memastikan Satker/PPK sudah mengisi data kontrak dan kinerja penyedia pada SPSE	Dit Pengadaan	BP2JK	Force Function

# TUGAS DAN FUNGSI

## BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN

### TUGAS

Balai Jasa Konstruksi mempunyai **tugas** melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi.

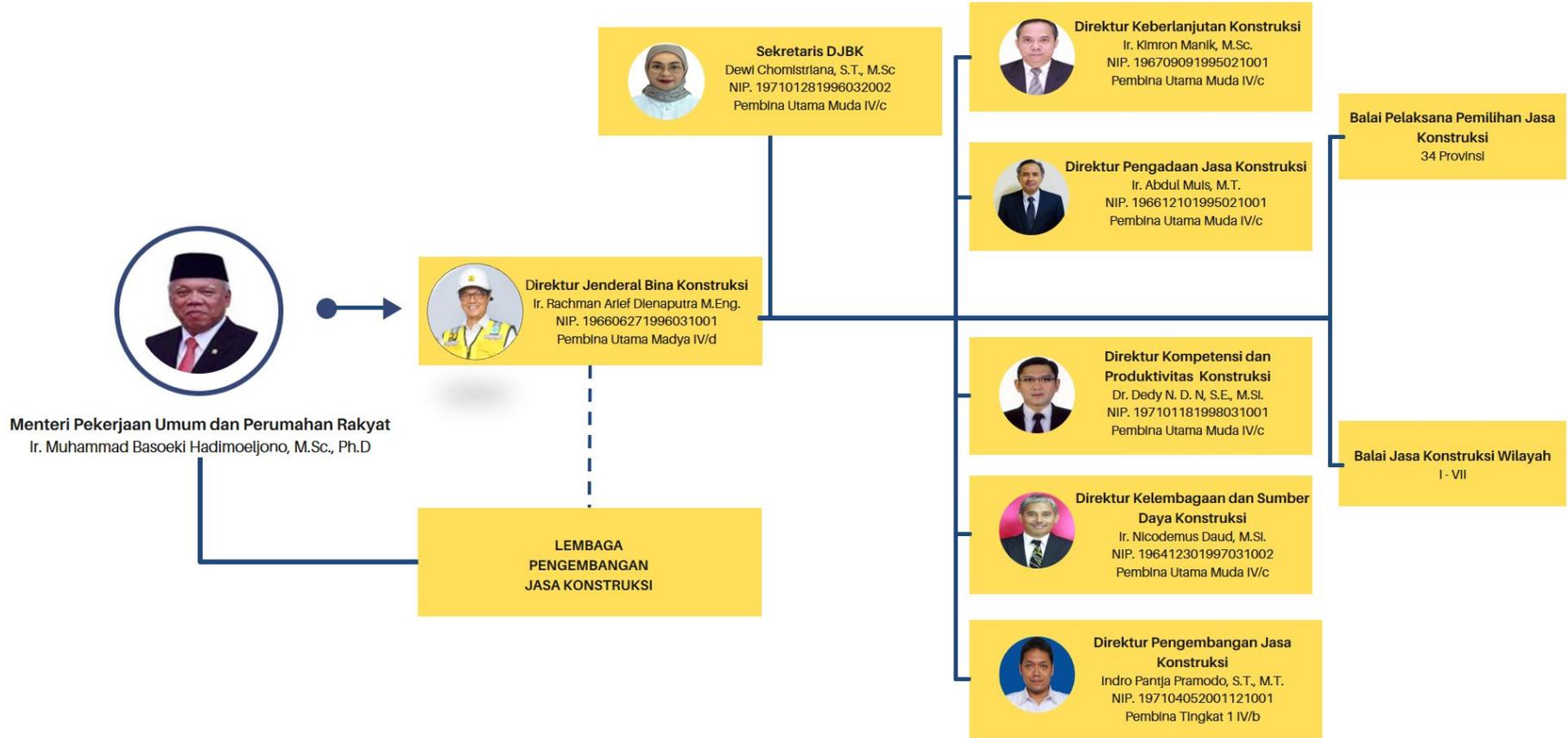
### FUNGSI

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Penyusunan rencana kerja pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat di wilayahnya;
- d. Pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
- e. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi percontohan di wilayahnya;
- f. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi instruktur dan asesor konstruksi di wilayahnya;
- g. Pengumpulan data sumber daya jasa konstruksi di wilayahnya;
- h. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi di wilayahnya; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Permen PUPR RI Nomor 16  
Tahun 2020 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Unit  
Pelaksana Teknis di  
Kementerian PUPR

# STRUKTUR ORGANISASI

## DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI



# STRUKTUR ORGANISASI

## BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN



**Direktur Jenderal Bina Konstruksi**  
Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg.



**Kepala Balai**  
Alfet Bahari, S.T., M.T.  
NIP. 197503222003121002  
Pembina IV/a



**Kasubag Umum dan Tata Usaha**  
M. Agung Dermawan, SH  
NIP. 198209182008011010  
Penata Tingkat I - III/d

**Pendukung Substantif**  
(Staf Sub Bagian Umum dan Tata Usaha)  
12 Orang



**Kasi Pelaksanaan**  
Boma Rizkiko, ST  
NIP. 198112032009121001  
Penata - III/c

**Pendukung Substantif**  
(Staf Seksi Pelaksanaan)  
13 Orang

**KELOMPOK  
JABATAN  
FUNGSIONAL**

03

**MITRA KERJA DAN LINGKUP  
PELAKSANAAN TUSI  
BJKW V BANJARMASIN**

# MITRA KERJA BJKW V BANJARMASIN

## **KALBAR**

OPD : 1 Prov/2 Kota / 12 Kab  
BALAI PUPR : 5  
UNIVERSITAS : 2  
POLITEKNIK : 2  
SMK : 16

## **KALTARA**

OPD : 1 Prov / 1 Kota / 4 Kab  
BALAI PUPR : 4  
UNIVERSITAS : 2  
POLITEKNIK : 1  
SMK : 3

## **KALTIM**

OPD : 1 Prov / 3 Kota / 7 Kab  
BALAI PUPR : 5  
UNIVERSITAS : 4  
POLITEKNIK : 2  
SMK : 12

## **KALTENG**

OPD : 1 Prov / 1 Kota / 13  
Kab  
BALAI PUPR : 4  
UNIVERSITAS : 3  
POLITEKNIK : 2  
SMK : 12

## **KALSEL**

OPD : 1 Prov / 2 Kota / 11 Kab  
BALAI PUPR : 6  
UNIVERSITAS : 5  
POLITEKNIK : 2  
SMK : 10

## Wilayah Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin

URAIAN	TOTAL
PROVINSI	5
KABUPATEN	47
KOTA	9
BALAI/UPT PUPR	24
UNIVERSITAS BIDANG KONSTRUKSI	16
POLITEKNIK BIDANG KONSTRUKSI	10
SMK BIDANG KONSTRUKSI	53

# LSP DAN KETERSEDIAAN ASESOR KOMPETENSI TENAGA KERJA (AKTK) WIL. KALIMANTAN

<b>NO DAN NAMA LSP (LISENSIJAKON.PU.GO.ID)</b>	<b>Kalimantan Barat</b>	<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>Kalimantan Timur</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Grand Total</b>
01. LSP ASTEKINDO KONSTRUKSI MANDIRI	40	17	6	21	22	<b>106</b>
02. LSP GATAKI KONSTRUKSI MANDIRI	3	4	1	6	1	<b>15</b>
03. LSP PETAKINDO KONSTRUKSI MANDIRI	2			4	9	<b>15</b>
04. PT. ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA	17	11	5	104		<b>137</b>
05. LSP HATSINDO INDONESIA TEKNIK	4		4	24		<b>32</b>
06. LSP AFILIASI TENAGA INFRASTRUKTUR	5		3	2		<b>10</b>
08. LSP SMKN 4 PONTIANAK	44					<b>44</b>
09. PT.SERTIFIKASI PROFESI KONSTRUKSI ASTTATINDO	2		1			<b>3</b>
10. BINA KONSTRUKSI NUSANTARA			1	20		<b>21</b>
13. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI WIKA		1				<b>1</b>
20. LSP K3 KONSTRUKSI	5			2		<b>7</b>
38. LSP SMKN 2 BANJARBARU		28				<b>28</b>
42. KOMPETENSI KONSTRUKSI MANDIRI					3	<b>3</b>
<b>Grand Total</b>	<b>122</b>	<b>61</b>	<b>21</b>	<b>183</b>	<b>35</b>	<b>422</b>

# SBU KBLI 2017

na KBLI 2017



Jumlah Badan Usaha **1,360**

Jumlah Subklasifikasi **6,260**

Jenis BU Perbadan Usaha

konsultan	103
kontraktor	1,257

Terintegrasi **1**

Kualifikasi Perbadan Usaha

Besar	22
Kecil	1,071
Menengah	267

Bentuk BU Perbadan Usaha

Bentuk BU	
Badan Usaha Nasional	1,359
Orang Perseorangan	1

Jenis BU Perbadan Persubklas

konsultan	711
kontraktor	5,548
Terintegrasi	1

Kualifikasi Perbadan Persubklas

Besar	52
Kecil	4,803
Menengah	1,405

Bentuk BU Perbadan Persubklas

Badan Usaha Nasional	6,256
Orang Perseorangan	4

Sebaran Badan Usaha Perkabupaten

Kabupaten	konsultan	kontraktor
Kab. Berau	11	74
Kab. Kutai Barat		30
Kab. Kutai Kartanegara	9	140
Kab. Kutai Timur		144
Kab. Mahakam Ulu	4	9
Kab. Paser	10	87
Kab. Penajam Paser Utara		26
Kota Balikpapan	121	1,241

Sebaran Subklasifikasi Perkabupaten

Kabupaten	konsultan	kontraktor
Kab. Berau	73	319
Kab. Kutai Barat		129
Kab. Kutai Kartanegara	55	607
Kab. Kutai Timur		605
Kab. Mahakam Ulu	24	37
Kab. Paser	60	377
Kab. Penajam Paser Utara		110
Kota Balikpapan	121	1,241

## SBU kabupaten

Kabupaten	konsultan	kontraktor
Kab. Berau	73	319
Kab. Kutai Barat		129
Kab. Kutai Kartanegara	55	607
Kab. Kutai Timur		605
Kab. Mahakam Ulu	24	37
Kab. Paser	60	377
Kab. Penajam Paser Utara		110
Kota Balikpapan	121	1,241
Kota Bontang	36	440
Kota Samarinda	342	1,684

## bu perkabupaten

Kabupaten	konsultan	kontraktor
Kab. Berau	11	74
Kab. Kutai Barat		30
Kab. Kutai Kartanegara	9	140
Kab. Kutai Timur		144
Kab. Mahakam Ulu	4	9
Kab. Paser	10	87
Kab. Penajam Paser Utara		26
Kota Balikpapan	19	290
Kota Bontang	5	100
Kota Samarinda	45	357

# SBU KBLI 2020



Jumlah  
Badan  
Usaha

**1,757**

Kualifikasi

Besar	24
Kecil	1,541
Menengah	104

jenis bu terintegrasi

terintegrasi	1
--------------	---

spesialis bu

Spesialis	109
-----------	-----

Jenis BU

konsultan	179
kontraktor	1,578

Bentuk BU

BUJK	1,757
------	-------

Jumlah  
Subklasi-  
fikasi

**5,348**

Kualifikasi

Besar	42
Kecil	4,942
Menengah	204
Spesialis	160

Jenis BU

Jenis Usaha	
Konsultan	548
Kontraktor	4,796
Terintegrasi	4

Bentuk BU

BUJK	5,348
------	-------

Sebaran Badan Usaha Perkabupaten

Kabupaten	Konsultan	Kontraktor
Kab. Berau	14	108
Kab. Kutai Barat	3	45
Kab. Kutai Kartanegara	21	191
Kab. Kutai Timur	3	301
Kab. Mahakam Ulu		2
Kab. Paser	9	128
Kab. Penajam Paser Utara	7	44
Kota Balikpapan	19	287
Kota Bontang	13	104
Kota Samarinda	90	368

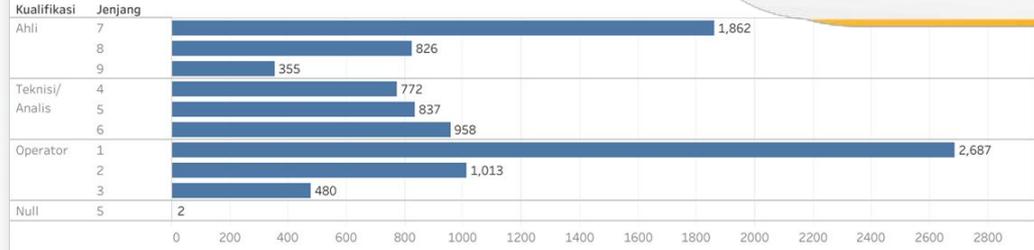
Sebaran Subklasifikasi Perkabupaten

Kabupaten	Konsultan	Kontraktor
Kab. Berau	40	311
Kab. Kutai Barat	7	123
Kab. Kutai Kartanegara	67	564
Kab. Kutai Timur	9	1,000
Kab. Mahakam Ulu		4
Kab. Paser	20	410
Kab. Penajam Paser Utara	18	156
Kota Balikpapan	63	768
Kota Bontang	43	296
Kota Samarinda	281	1,168

# SEBARAN SKK



## Jumlah Jenjang Persertifikat



jumlah  
skk  
**9,792**

## Sebaran SKK Perkabupaten

Kab. Berau	165
Kab. Kutai Barat	240
Kab. Kutai Kartanegara	1,869
Kab. Kutai Timur	619
Kab. Mahakam Ulu	50
Kab. Paser	362
Kab. Penajam Paser Utara	1,343
Kota Balikpapan	1,595
Kota Bontang	603
Kota Samarinda	2,946

jumlah tsk  
**7,459**

## Sebaran TSK Perkabupaten

Kab. Berau	140
Kab. Kutai Barat	191
Kab. Kutai Kartanegara	1,612
Kab. Kutai Timur	523
Kab. Mahakam Ulu	44
Kab. Paser	293
Kab. Penajam Paser Utara	926
Kota Balikpapan	1,245
Kota Bontang	462
Kota Samarinda	2,023

# SKT BERLAKU

Sebaran Tenaga Terampil



Jumlah PerKualifikasi



Jumlah Tenaga Terampil

2,161

Jumlah SKT

2,270

## kabupaten skt

### Kabupaten Alamat

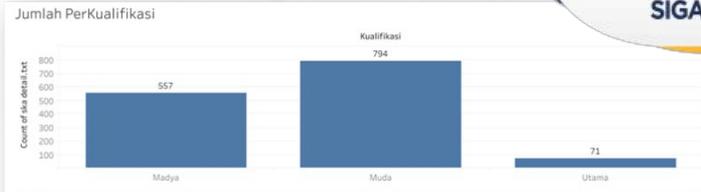
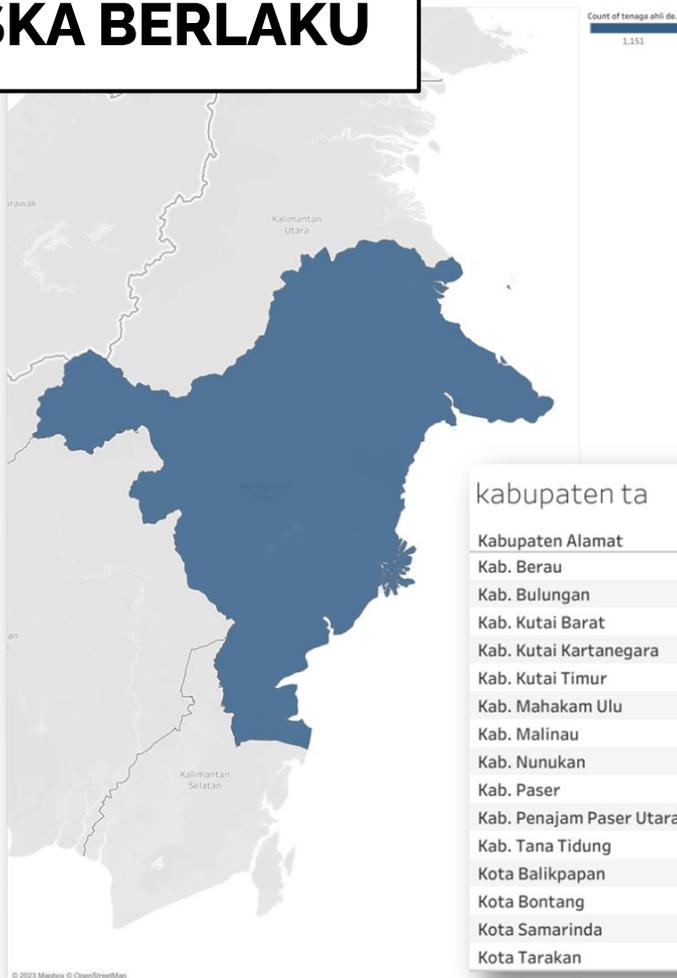
Kab. Berau	65
Kab. Bulungan	1
Kab. Kutai Barat	33
Kab. Kutai Kartanegara	223
Kab. Kutai Timur	400
Kab. Mahakam Ulu	4
Kab. Malinau	2
Kab. Nunukan	2
Kab. Paser	345
Kab. Penajam Paser Utara	129
Kota Balikpapan	555
Kota Bontang	64
Kota Samarinda	442
Kota Tarakan	5

## kabupaten tt

### Kabupaten Alamat

Kab. Berau	59
Kab. Bulungan	1
Kab. Kutai Barat	29
Kab. Kutai Kartanegara	221
Kab. Kutai Timur	394
Kab. Mahakam Ulu	4
Kab. Malinau	2
Kab. Nunukan	2
Kab. Paser	319
Kab. Penajam Paser Utara	129
Kota Balikpapan	522
Kota Bontang	62
Kota Samarinda	412
Kota Tarakan	5

# SKA BERLAKU



Jumlah SKA

1,422

Jumlah Tenaga Ahli

1,151

## kabupaten ta

kabupaten ta	Count
Kabupaten Alamat	
Kab. Berau	32
Kab. Bulungan	5
Kab. Kutai Barat	19
Kab. Kutai Kartanegara	76
Kab. Kutai Timur	32
Kab. Mahakam Ulu	1
Kab. Malinau	3
Kab. Nunukan	7
Kab. Paser	58
Kab. Penajam Paser Utara	23
Kab. Tana Tidung	1
Kota Balikpapan	318
Kota Bontang	56
Kota Samarinda	507
Kota Tarakan	13

## kabupaten ska

kabupaten ska	Count
Kabupaten Alamat	
Kab. Berau	35
Kab. Bulungan	5
Kab. Kutai Barat	25
Kab. Kutai Kartanegara	90
Kab. Kutai Timur	36
Kab. Mahakam Ulu	1
Kab. Malinau	5
Kab. Nunukan	7
Kab. Paser	73
Kab. Penajam Paser Utara	26
Kab. Tana Tidung	1
Kota Balikpapan	401
Kota Bontang	59
Kota Samarinda	645
Kota Tarakan	13

04

**PROGRES PELAKSANAAN  
TUGAS DAN FUNGSI BJKW V  
TA 2023**

# PERJANJIAN KINERJA BJKW5 - TA. 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI</b>		
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi</b>		
<b>Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina</b>	<b>Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina</b> Output: SDM vokasional (SMK, Politeknik, Universitas) yang terbina SDM instruktur pelatihan dan asesor kompetensi bidang konstruksi yang terbina	<b>81%**)</b>  2.342 Orang 100 Orang
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
<b>Kegiatan Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi</b>		
<b>Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi</b>	<b>Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat</b> Output: Tenaga kerja konstruksi terbina Tenaga kerja konstruksi terbina (mendukung pembangunan IKN) Dukungan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pra Konstruksi Dukungan Pelaksanaan Lomba Keterampilan Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia	<b>13%**)</b>  553 Orang 2.500 Orang 1 Laporan 1 Laporan
<b>Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi</b>		
<b>Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN</b> Output: Dukungan Penerapan Sistem Informasi HPS Terintegrasi (SIPASTI) Dukungan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Dukungan Peningkatan Registrasi MPK melalui SIMPK dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Sasaran Nilai TKDN Dukungan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan Konstruksi dengan Penawaran Terkoreksi <80% HPS	<b>98%*)</b>  1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

# PROGRES PEMBINAAN TKK BJKW5 - TA. 2023

(s.d 20 November 2023)

OUTPUT	PERJ. KINERJA* (JUMLAH ORANG)	REALISASI MINGGU -1		REALISASI ON PROGRESS		REALISASI S.D MINGGU INI	
		JUMLAH ORANG	PERSEN (%)	JUMLAH ORANG	PERSEN (%)	JUMLAH ORANG	PERSEN (%)
SDM Vokasional bidang konstruksi yang terbina	1.510	1.562	103,44%	76	5,03%	1.638	108,48%
Tenaga kerja konstruksi terbina	553	707	127,85%	0	0,00%	707	127,85%
Tenaga kerja konstruksi terbina (mendukung pembangunan IKN)	<b>3.801</b>	3.806	100,13%	196	5,16%	<b>4.002</b>	105,29%
<b>TOTAL</b>	<b>5.864</b>	<b>6.075</b>	<b>98,30%</b>	<b>272</b>	<b>4,40%</b>	<b>6.347</b>	<b>108,24%</b>

# RENCANA PEMBINAAN TKK BJKW TA 2024

## Hasil Rapat Koordinasi BJKW - DJBK (1 Sept 2023) :

1. TKK pada jenjang 5, 6, dan 7 menjadi target prioritas sasaran sertifikasi untuk pemenuhan persyaratan PJTBU dan PJSKBU,
2. Langkah persiapan antara lain :
  - a. Pemetaan kebutuhan TKK di wilayahnya (OPD, Asosiasi, BUJK)
  - b. Identifikasi Target TKK per jenjang, per jabatan kerja dan masa berlaku (LPJK)
  - c. Identifikasi asesor, instruktur, perangkat kelengkapan (SKKNI, modul, dll)
3. Pembinaan TKK pada jenjang 1 s/d 4 harus disertai sertifikasi.

## Rencana target pembinaan TKK berdasarkan RKAK/L TA 2024 :

1. Pelatihan dan Uji/Sertifikasi SDM Vokasional Bidang Konstruksi di Kalimantan sebanyak 2160 orang
2. Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Kalimantan sebanyak 3280 orang

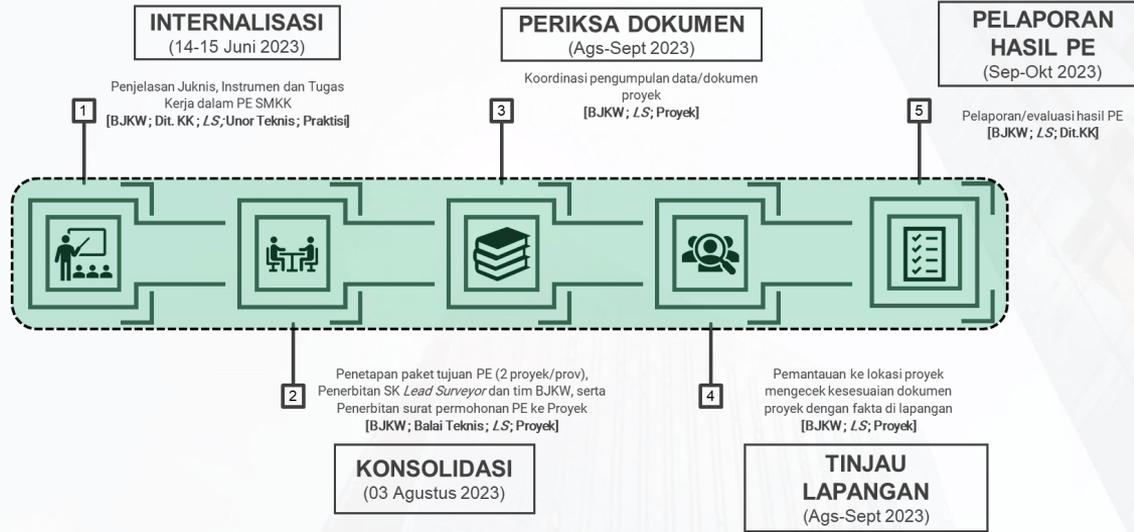
# KEBUTUHAN PJTBU DAN PJSKBU (PP 05/2021)

Jenis BUJK	JASA KONSULTANSI			JASA KONSTRUKSI			JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI		
	PJBU	Jenjang Minimum		PJBU	Jenjang Minimum		PJBU	Jenjang Minimum	
		PJTBU	PJSKBU		PJTBU	PJSKBU		PJTBU	PJSKBU
<b>UMUM</b>									
- BUJK-N (KECIL)	√	7	6	√	6	5	N/A	N/A	N/A
- BUJK-N (MENENGAH)	√	8	7	√	7	6	N/A	N/A	N/A
- BUJK-N (BESAR)	√	9 *	8	√	8	7	√	9	8 **
- KP BUJK-A (BESAR)	√	9 *	9 *	√	9 *	9 *	√	9 *	9 * **
<b>SPESIALIS</b>									
- BUJK-N	√	7	7	√	8	7	N/A	N/A	N/A
- KP BUJK-A	√	9 *	8	√	9 *	8	N/A	N/A	N/A

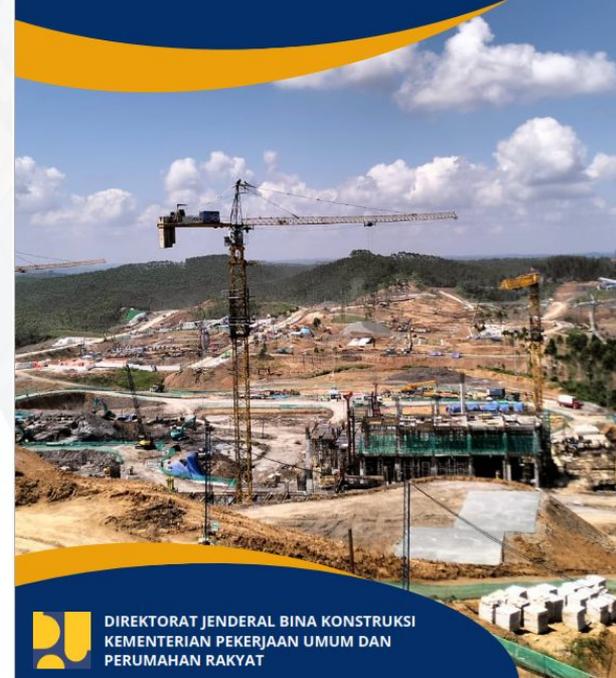
**PJTBU** : Penanggungjawab Teknik Badan Usaha

**PJSKBU** : Penanggungjawab Sub Klasifikasi Badan Usaha

# PE PENERAPAN SMKK TA 2023 (1)



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SOP PE PENERAPAN SMKK)



# PE PENERAPAN SMK TA 2023 (2)

No	Provinsi	Nama Paket	Bidang Pekerjaan	Pemilik Paket Pekerjaan	Hasil Penilaian Dokumen	Hasil Penilaian Lapangan
1	Kalimantan Utara	Pembangunan Gedung DPRR Kalimantan Utara	Perumahan	Dinas PU Kaltara	75%	90%
2	Kalimantan Barat	Pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar (MYC)	BM	BPJN Kalbar	100%	97%
3	Kalimantan Barat	Duplikasi Jembatan Kapuas I (MYC)	BM	BPJN Kalbar	93%	89%
4	Kalimantan Tengah	Optimalisasi SPAM IKK Bejarau (Sei Lepeh) Kabupaten Kotawaringin Timur (NUWSP)	CK	BPPW Kalteng	78%	75%
5	Kalimantan Tengah	Pembangunan Saluran Primer Ring Drain Luar Pengendali Banjir Kota Sampit	CK	BPPW Kalteng	60%	66%
6	Kalimantan Timur	Pembangunan Pengendalian Banjir DAS Sanggai 1A (KIPP)	SDA	BWS Kalimantan IV	94%	99%
7	Kalimantan Timur	Proyek Pembangunan Jalan Kerja Kawasan Sub BWP 1.B dan 1.C	BM	B2PJN Kaltim	79%	93,8%

# PE PENERAPAN SMKK TA 2023 (3)



**Pelaksanaan PE Penerapan SMKK  
pada Pembangunan Gedung  
DPRD Kalimantan Utara**



**Pelaksanaan PE Penerapan SMKK  
pada Pembangunan Jembatan  
Sungai Sambas Besar (MYC)**



**Pelaksanaan PE Penerapan SMKK  
pada Proyek Pembangunan  
Jalan Kerja Kawasan  
Sub BWP 1.B dan 1.C**

# VERIFIKASI CAPAIAN TKDN TA 2023 (1)



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : PB 0101-Mn/2075 Jakarta, 17 Oktober 2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Yth.:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Para Kepala Balai
4. Para Kepala Satuan Kerja
5. Para Pejabat Pembuat Komitmen

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 serta Surat Menteri PUPR Nomor PB.01.01-Mn/2775, dilakukan pengaturan pengendalian penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing sebagai berikut:

1. Penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing pada Tahun 2022 dibatasi sebesar paling tinggi 10% dan pada Tahun 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5% dari pagu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing dapat diberikan persetujuan dengan syarat:
  - a. Memperhatikan urutan prioritas penggunaan produk dan tenaga kerja dalam negeri; dan
  - b. Memastikan ketersediaan produk dan tenaga kerja dalam negeri melalui sumber informasi yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Dalam hal angka 2 tidak terpenuhi, persetujuan penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing dapat diberikan dengan pembagian kewenangan berdasarkan nilai pengadaan barang impor dan tenaga kerja asing sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nilai Pengadaan
1	Menteri	di atas Rp1.000.000.000,-
2	Pejabat Tinggi Madya	paling banyak Rp1.000.000.000,-
3	Pejabat Tinggi Pratama/ Kepala Satuan Kerja Unit Eselon II	paling banyak Rp500.000.000,-
4	Kepala Balai/ Kepala Satuan Kerja Unit Eselon III	paling banyak Rp200.000.000,-
5	Kepala Satuan Kerja	paling banyak Rp100.000.000,-

4. Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 selanjutnya diatur oleh Ketua Tim Pelaksana P3DN Kementerian PUPR sesuai amanat Keputusan Menteri PUPR Nomor 280/M/KPTS/2022.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemitraan dan Investasi;
2. Menteri Perindustrian;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**PUPR**  
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

TIM P3DN  
KEMENTERIAN PUPR

KITA - 01 REV.00

BUKU KITA (KENDALI IMPOR DAN TENAGA ASING)

**MEKANISME PENGENDALIAN  
PENGUNAAN BARANG IMPOR  
DAN TENAGA KERJA ASING  
PADA PENGADAAN BARANG/JASA  
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**TAHUN 2022**

**BARANG BUKTAN  
INDONESIA**

# VERIFIKASI CAPAIAN TKDN TA 2023 (2)

No.	Paket Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa	Unit Organisasi	Balai/UPT	Keterangan
1.	Pembangunan Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum SPAM Sepaku Paket 1	PT. Brantas Abipraya (Persero)	Direktorat Jenderal Cipta Karya	BPPW Kalimantan Timur	Telah diverifikasi. Nilai Bobot KDN thdp progress: 59,59% (per 10 Oktober 2023)
2.	Pembangunan Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum SPAM Sepaku Paket 2	PT. Brantas Abipraya (Persero)	Direktorat Jenderal Cipta Karya	BPPW Kalimantan Timur	Telah diverifikasi. Nilai Bobot KDN thdp progress: 55,65% (per 9 Oktober 2023)
3.	PP Pembangunan Jalan di dalam KIPP: Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Direktorat Jenderal Bina Marga	BBPJM Wilayah Kalimantan Timur	Telah diverifikasi. Nilai Bobot KDN thdp progress: 41,83% (per 13 Oktober 2023)
4.	Pembangunan Jalan Kerja Kawasan Sub BWP 1.B dan 1.C	PT. Brantas Abipraya (Persero)	Direktorat Jenderal Bina Marga	BBPJM Wilayah Kalimantan Timur	Telah diverifikasi. Nilai Bobot KDN thdp progress: 49,02% (per 12 Oktober 2023)

# VERIFIKASI CAPAIAN TKDN TA 2023 (3)

No.	Paket Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa	Unit Organisasi	Balai/UPT	Keterangan
5.	Pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP): Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.	Direktorat Jenderal Bina Marga	BBPJN Wilayah Kalimantan Timur	Telah diverifikasi. Nilai Bobot KDN thdp progress: 48,44% (per 13 Oktober 2023)
6.	Penyempurnaan dan Penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi (IKN)	PT Brantas Abipraya (Persero)	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	BWS Kalimantan IV	Telah diverifikasi. Nilai Bobot KDN thdp progress: 42,15% (per 09 November 2023)
7.	Pembangunan Embung KIPP Kab. Penajam Paser Utara (IKN)	PT Brantas Abipraya (Persero)	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	BWS Kalimantan IV	Telah diverifikasi. Nilai Bobot KDN thdp progress: 24,78% (per 07 November 2023)
8.	PP Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I (IKN)	PT Brantas Abipraya (Persero)	Direktorat Jenderal Cipta Karya	BPPW Kalimantan Timur	Telah diverifikasi. Nilai Bobot KDN thdp progress: 20,64% (per 08 November 2023)

# VERIFIKASI CAPAIAN TKDN TA 2023 (4)

No.	Paket Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa	Unit Organisasi	Balai/UPT	Keterangan
9.	PP Pembangunan Rumah Khusus IKN	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Direktorat Jenderal Perumahan	BP2P Kalimantan Timur	Telah diverifikasi. Nilai Bobot KDN thdp progress: 36,36% (per 10 November 2023)
10.	Pembangunan Pengendalian Banjir DAS Sanggai 1A (KIPP) (IKN)	PT. Sumber Cahaya Agung	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	BWS Kalimantan IV	Telah diverifikasi. Nilai Bobot KDN thdp progress: 13,37% (per 11 November 2023)

# VERIFIKASI CAPAIAN TKDN TA 2023 (4)



**Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi Kab. Penajam Paser Utara (IKN)**



**Pembangunan Embung KIPP Kab. Penajam Paser Utara (IKN)**

# VERIFIKASI REGISTRASI PADA SI-MPK TA 2023 (1)



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp: (021) 72797548 Faksimil: (021) 7221782

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR: 12 /KPTS/Dk/2023  
TENTANG  
TIM PENGELOLA PENCATATAN  
SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 26A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;
- b. bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi mengatur pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi dalam sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;
- c. bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi mengatur pembentukan Tim Pengelola Pencatatan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi yang membidangi pembinaan konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Tim Pengelola Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi;

g

**SK Dirjen Bina  
Konstruksi Nomor  
12/KPTS/Dk/2023  
tentang Tim Pengelola  
Pencatatan Sumber  
Daya Material dan  
Peralatan Konstruksi**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI**

Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: (021) 736063 Faksimil: (021) 72749238

KEPUTUSAN DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR: 162 /KPTS/Kd/2023

TENTANG

TIM PENDUKUNG PELAKSANA PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL  
DAN PERALATAN KONSTRUKSI (SDMPK) DAERAH PADA  
BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH

DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI

- MENIMBANG : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi;
2. bahwa untuk melaksanakan Pasal 176 huruf g Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. bahwa untuk mencapai sasaran program meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Perjanjian Kinerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah terkait data Material dan Peralatan Konstruksi utama.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang

g

**SK Direktur  
Kelembagaan dan  
Sumber Daya  
Konstruksi Nomor  
162/KPTS/Kd/2023  
tentang Tim  
Pendukung Pelaksana  
Pencatatan Sumber  
Daya Material dan  
Peralatan Konstruksi  
(SDMPK) Daerah Pada  
Balai Jasa Konstruksi  
Wilayah**

# VERIFIKASI REGISTRASI PADA SI-MPK TA 2023 (2)

No.	Paket Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa	Unit Organisasi	Balai/UPT	Keterangan
1.	Pembangunan Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum SPAM Sepaku Paket 1	PT. Brantas Abipraya (Persero)	Direktorat Jenderal Cipta Karya	BPPW Kalimantan Timur	Registrasi MPK Diverifikasi dan Excel diupload ke SIMPK (10 Okt 2023)
2.	Pembangunan Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum SPAM Sepaku Paket 2	PT. Brantas Abipraya (Persero)	Direktorat Jenderal Cipta Karya	BPPW Kalimantan Timur	Registrasi MPK Diverifikasi dan Excel diupload ke SIMPK (11 Okt 2023)
3.	PP Pembangunan Jalan di dalam KIPP: Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Direktorat Jenderal Bina Marga	BBPJM Wilayah Kalimantan Timur	Registrasi MPK Diverifikasi dan Excel diupload ke SIMPK (12 Okt 2023)
4.	Pembangunan Jalan Kerja Kawasan Sub BWP 1.B dan 1.C	PT. Brantas Abipraya (Persero)	Direktorat Jenderal Bina Marga	BBPJM Wilayah Kalimantan Timur	Registrasi MPK Diverifikasi dan Excel diupload ke SIMPK (13 Okt 2023)

# VERIFIKASI REGISTRASI PADA SI-MPK TA 2023 (3)

No.	Paket Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa	Unit Organisasi	Balai/UPT	Keterangan
5.	Pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP): Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.	Direktorat Jenderal Bina Marga	BBPJM Wilayah Kalimantan Timur	Registrasi MPK Diverifikasi dan Excel diupload ke SIMPK (14 Okt 2023)
6.	Penyempurnaan dan Penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi (IKN)	PT Brantas Abipraya (Persero)	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	BWS Kalimantan IV	Registrasi MPK Diverifikasi dan Excel diupload ke SIMPK (09 Nov 2023)
7.	Pembangunan Embung KIPP Kab. Penajam Paser Utara (IKN)	PT Brantas Abipraya (Persero)	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	BWS Kalimantan IV	Registrasi MPK Diverifikasi dan Excel diupload ke SIMPK (07 Nov 2023)
8.	PP Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I (IKN)	PT Brantas Abipraya (Persero)	Direktorat Jenderal Cipta Karya	BPPW Kalimantan Timur	Registrasi MPK Diverifikasi dan Excel diupload ke SIMPK (08 Nov 2023)

# VERIFIKASI REGISTRASI PADA SI-MPK TA 2023 (4)

No.	Paket Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa	Unit Organisasi	Balai/UPT	Keterangan
9.	PP Pembangunan Rumah Khusus IKN	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Direktorat Jenderal Perumahan	BP2P Kalimantan Timur	Registrasi MPK Diverifikasi dan Excel diupload ke SIMPK (10 Nov 2023)
10.	Pembangunan Pengendalian Banjir DAS Sanggai 1A (KIPP) (IKN)	PT. Sumber Cahaya Agung	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	BWS Kalimantan IV	Registrasi MPK Diverifikasi dan Excel diupload ke SIMPK (11 Nov 2023)

# VERIFIKASI REGISTRASI PADA SI-MPK TA 2023 (5)



**Pembangunan Jaringan  
Perpipaan Transmisi Air Minum  
SPAM Sepaku Paket 1 & Paket 2**



**PP Pembangunan Jalan di dalam  
KIPP: Pembangunan Jalan Sumbu  
Kebangsaan Sisi Timur**

# SURVEY HSW - PENERAPAN SIPASTI TA 2023 (1)

## 9 STRATEGI PENCEGAHAN PENYIMPANGAN DALAM PBJ

- a. Memo Dinas Menteri PUPR Strategi 3 : Perbaikan Mekanisme HPS (2021 – 2022)
- b. Inmen PUPR Strategi 3 : Pemantapan Keandalan Penyusunan HPS (2022-2024)

## PERMEN PUPR 08/2023

Pasal 4 ayat (5) : Dalam melakukan Analisis HSD memperhitungkan Harga Satuan Pokok Tenaga Kerja, Bahan dan Alat berdasarkan lokasi pekerjaan

## RENAKSI STRANAS PK

- a. Renaksi Stranas PK (2021-2022)  
2022 : 10 Provinsi
- b. Renaksi Stranas PK (2023-2024)  
2023 : 34 Provinsi (@1 Paket)  
2024 : seluruh paket

**SIPASTI**

**PENINGKATAN KUALITAS HPS**

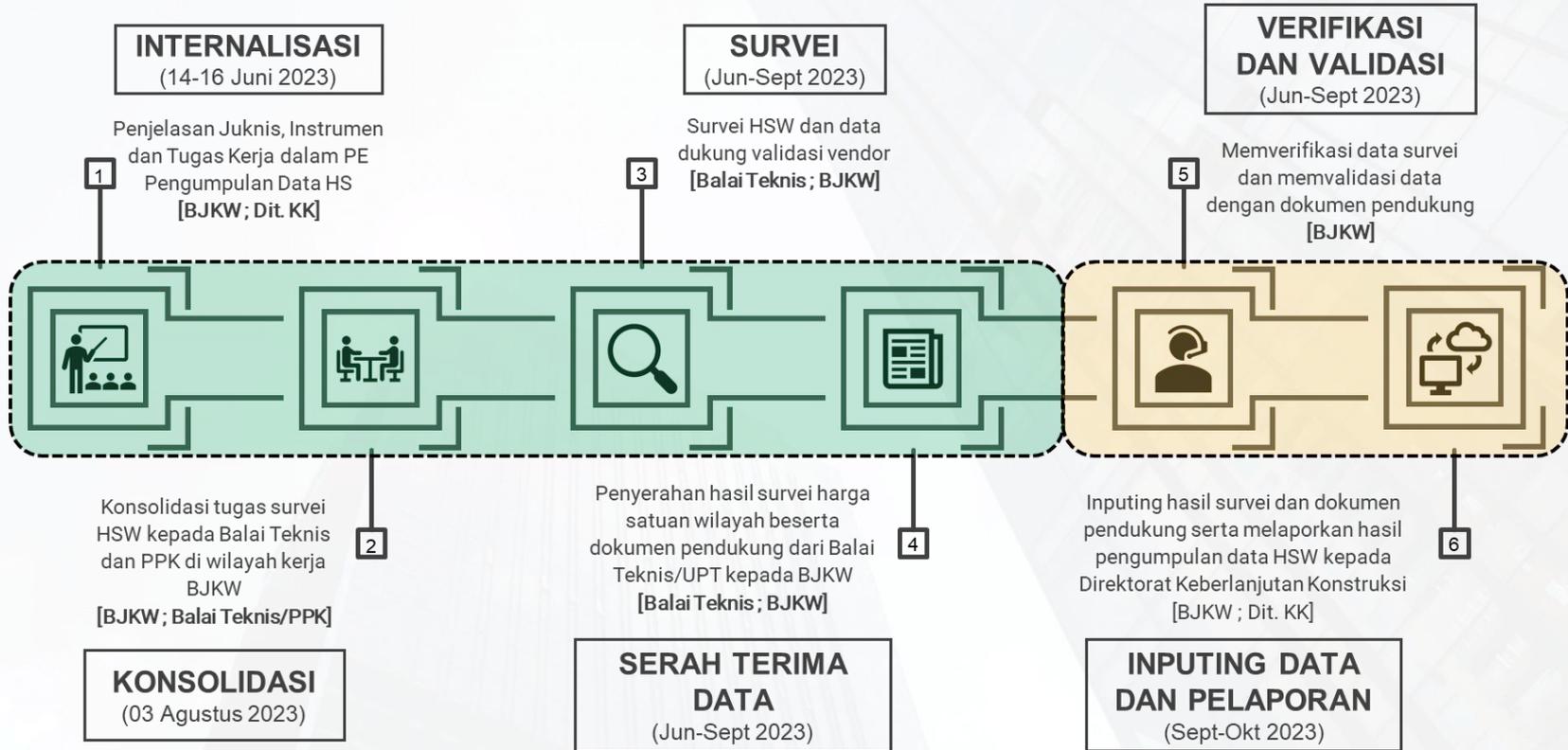


**SIPASTI**

SISTEM INFORMASI HARGA PERKIRAAN SENDIRI  
TERINTEGRASI V.2.0

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

# SURVEY HSW - PENERAPAN SIPASTI TA 2023 (1)



TERLAKSANA



ON GOING



TERJADWAL

# SURVEY HSW - PENERAPAN SIPASTI TA 2023 (1)

No	Provinsi	Nama Paket	Bidang Pekerjaan	Balai/ UPT	Keterangan
1	Kalimantan Barat	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kapuas Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalbar	SDA	BWS Kalimantan I	Terinput di E-Katalog (13-11-2023)
2	Kalimantan Barat	Pembangunan Rumah Khusus dan PSU Pendukung ASN Kejari Sekadau	Perumahan	BP2P Kalimantan I	Belum Ditindaklanjuti Balai Teknis
3	Kalimantan Selatan	Peningkatan Kapasitas Sungai Veteran Kota Banjarmasin Tahap I	SDA	BWS Kalimantan III	Terinput di E-Katalog (13-11-2023)
4	Kalimantan Selatan	Penanganan Ruas Jalan Kembang Kuning - Nawin Hulu	BM	BPJN Kalimantan Selatan	Terinput di E-Katalog (25-10-2023)
5	Kalimantan Selatan	Lanjutan KDP Gedung Laboratorium Keagamaan Putra dan Putri Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	CK	BPPW Kalimantan Selatan	Terinput di E-Katalog (13-11-2023)

# SURVEY HSW - PENERAPAN SIPASTI TA 2023 (1)

No	Provinsi	Nama Paket	Bidang Pekerjaan	Balai/ UPT	Keterangan
6	Kalimantan Timur	Pengendalian Banjir Sungai Pemaluan Kab. Penajam Paser Utara (IKN)	SDA	BWS Kalimantan IV	Terinput di E-Katalog (13-11-2023)
7	Kalimantan Timur	Pembangunan Unit Pengukuran Residu di KIPP IKN	CK	BPPW Kalimantan Timur	Verifikasi dan Validasi Data (Belum menginput Harga dan Data Vendor)
8	Kalimantan Tengah	Peningkatan Drainase Utama Pengendali Banjir Kota Palangka Raya	SDA	BWS Kalimantan II	Terinput di E-Katalog (25-10-2023)
9	Kalimantan Utara	Lanjutan Pemasangan Pipa Transmisi Intake Sungai Kayan ke IPA Sungai Buaya dan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor	SDA	BWS Kalimantan V	Terinput di E-Katalog (21-11-2023)

05

# KONSTRUKSI INDONESIA TAHUN 2023

# VIDEO KONSTRUKSI INDONESIA 2023



## KONSTRUKSI INDONESIA 2023

**NOV**  
2023 | JAKARTA  
INTERNATIONAL  
EXPO



# PENGHARGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) BID. JASA KONSTRUKSI

OPD Tingkat Provinsi Terbaik :

1. Provinsi Jawa Tengah
2. **Provinsi Kalimantan Timur**
3. **Provinsi Kalimantan Utara**

OPD Tingkat Kabupaten Terbaik :

1. Kabupaten Madiun – Jatim
2. **Kabupaten Barito Kuala – Kalsel**
3. Kabupaten Gresik – Jatim



# PENGHARGAAN KOMPETISI KONSTRUKSI (LOMBA TUKANG) - KI 2023

## 1. JUARA I OPERATOR EXCAVATOR a. n. APRIANSYAH (Kota Bontang)



## 2. JUARA 3 TUKANG PASANG BATA a.n WARAS WAHYUDI (Kab. Penajam Paser Utara)

06

# DOKUMENTASI KEGIATAN

# DOKUMENTASI KEGIATAN



**KEGIATAN VERIFIKASI KOMITMEN BELANJA  
PRODUK DALAM NEGERI (PDN) SERTA  
MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI  
(MPK) BALAI/SATKER MELALUI I-MONITORING  
PUPR PADA WILAYAH KERJA BALAI JASA  
KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN**



# DOKUMENTASI KEGIATAN



**KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN  
TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN  
KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI NON  
PENGAMPU LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
DI WILAYAH KALIMANTAN**



# DOKUMENTASI KEGIATAN



**KEGIATAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI  
PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN JALAN**



# DOKUMENTASI KEGIATAN



**KEGIATAN PELATIHAN BUILDING  
INFORMATION MODELLING (BIM) MODELLER**

# DOKUMENTASI KEGIATAN



**KEGIATAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI  
TEKNISI GEOTEKNIK**



# DOKUMENTASI KEGIATAN



KUNJUNGAN LAPANGAN PENGAWAS BANGUNAN GEDUNG  
DI PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PERWAKILAN BPKP

DI KOTA SAMARINDA, 14 APRIL 2023

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI DALAM  
MENDUKUNG PEMBANGUNAN IKN

PENGAWAS BANGUNAN GEDUNG

SAMARINDA, 10 APRIL 2023



KEGIATAN PELATIHAN DAN  
SERTIFIKASI PENGAWAS  
BANGUNAN GEDUNG

# TERIMA KASIH

BALAI JASA KONSTRUKSI  
WILAYAH V BANJARMASIN

Telepon : (0511) 3365317

Surel : [bjkwvbjm@pu.go.id](mailto:bjkwvbjm@pu.go.id)

Instagram : [@pupr\\_bjkw5\\_banjarmasin](https://www.instagram.com/pupr_bjkw5_banjarmasin)



